Menyoal Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Bernegara Ketika Nilai Pancasila Terabaikan

Tarmizi Abbas
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Gorontalo
Email: abbastarmizi@gmail.com

Ismail Suardi Wekke
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Sorong
Email: iswekke@gmail.com

Bahan Diskusi
Simposium Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
“Kontribusi KAHMI Untuk Negeri;
Opsional Solusi Masalah Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”
Jum’at, 21 Desember 2018

Pendahuluan

Sejak menemukan bentuk ketatanegaraan yang *pasca* Orde Baru¹, Bangsa Indonesia tampaknya mulai menyadari; demokrasi menjadi pilihan cara untuk merangkul kemajemukan (Hardiman, 2004). Di tahun-tahun Orde Baru, “tafsir tunggal” diberlakukan pada segala hal, termasuk Pancasila. Sebagai dasar negara, sejarah mencatat, bahwa Pancasila pernah dimunculkan pada sebuah konteks negatif dalam kehidupan bersama. Selama kurang lebih 32 tahun, Orde Baru bergerak dengan tafsir Pancasila sendiri. Mereka berhasil membuat Pancasila yang disulam penuh dedikasi kemanusiaan, menjadi begitu menakutkan.

Tahun 1998, Orde Baru berakhir. Reformasi² sebagai sebuah era baru, terlihat dengan citra yang terbuka. Studi-studi pembangunan—yang sebelumnya hanya tersentralisasi di pusat—kini telah bergeser cukup jauh (Haryanto, 2017). Fase itu ditandai dengan perubahan corak pemerintah yang semula otoritarian menjadi lebih

¹ Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan sahnya Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) pada tahun 1966. Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dari tahun 1966 hingga 1998.

² Era Pasca Soeharto atau Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998 sampai dengan saat ini. Era ini dimulai tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

demokratis. Hampir bisa dipastikan, Reformasi adalah era otokritik. Hal tersebut diteguhkan dengan penambahan pasal 28E pada sidang MPR bulan Agustus tahun 2000 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani" (Undang-Undang Dasar 1945, 1945).

Akan tetapi, beberapa studi justru membuktikan hal yang berlawanan. Daniel Dhakidae menegaskan bahwa pengalaman ideologis Pancasila pada masa Orde Baru adalah penyebab pelbagai komunitas akademik/intelektual menjadi kurang bergairah mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pancasila (Dakhidae, 2018). Begitu juga, Rocky Gerung dengan tegas mempersoalkan bahwa Pancasila sebenarnya hanya berganti fase, tetapi bentuk-bentuk indoktrinasi otoritarian sebenarnya masih terus diproduksi (Gerung, 2018).

Jika seperti ini, bisa saja disimpulkan bahwa Orde Baru mewariskan trauma. Trauma, yang pada gilirannya, dibahasakan Daniel Dhakidae sebagai peristiwa berwajah kembar. Pertama, siapapun yang pernah mengalaminya pasti pernah terluka dan kedua, setelah terluka diserang (Dhakidae, 2018). Padahal, pemerintah negara ini mahfum, bahwa Pancasila adalah landasan ideal ketahanan nasional bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dibakukan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002, bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kemenhan, 2016).

Akan tetapi jika diperhatikan secara sepintas, persoalan-persoalan governasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia belum benar-benar menjadikan Pancasila landasan filosofis dalam mengambil setiap keputusan. Hal itu terlihat lantaran keadilan dan kebijaksanaan—yang menjadi fokus dalam Pancasila—masih saja menjadi masalah yang tak selesai dibahas dalam kontur pembangunan, ketahanan pangan dan ekosistem politik Indonesia dari tahun ke tahun. Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini terbilang lebih kompleks. Globalisasi tidak hanya berhasil membuka peluang bagi sebuah negara untuk berkembang, melainkan pada saat yang bersamaan juga menciptakan disiintegrasi yang cukup serius (Rix, 2003).

Ketika memasuki imperium ke III, masyarakat global akan dihadapkan oleh kondisi yang disebut Alvin Toffler sebagai “*terra incognita*”, yakni sebuah zaman yang tak terpetakkan (Toffler, 1980). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa pada gelombang ketiga teknologi, manusia akan memasuki era di mana informasi melimpahruah (*spill over information*) (Bagir, 2016). Siapapun bisa memperoleh, membagikan, mengekstraksi bahkan membuat informasi yang minim validasi, sebagaimana juga menerima tanpa verifikasi.

Hal-hal ini tentu saja berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Apalagi dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, isu SARA sedang mengemuka. Ketersinggungan bisa terjadi tanpa kontak langsung, melainkan dimulai dari kanal-kanal media sosial. Di sisi lain, kelompok-kelompok keagamaan yang ekstrim dan radikal juga sedang naik daun. Mereka hadir di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengidap krisis identitas, siap dihantam oleh ideologi manapun. Kelompok-kelompok ini, pandai mencipta dan memanfaatkan momentum untuk memperoleh simpati masyarakat (Kuntowijoyo, 1994).

Mencermati pelbagai peristiwa ini, tentu saja dapat dicermati bahwa kaitan antara ketahanan nasional dan Pancasila sebagai basis filosofis sangat erat. Sementara itu, 20 tahun terakhir ini esensi Pancasila itu dibiarkan terserak begitu saja. Tulisan ini akan menganalisis keterabaian nilai-nilai Pancasila itu pada konteks ketahanan nasional, terlebih dalam mencermati masalah pangan dan sosial politik.

A Thought Provoking: Pancasila dalam Konteks Ketahanan Nasional

Tidak ada bangsa yang berdiri tanpa harapan dan cita-cita, sama halnya dengan tidak ada bangsa yang berhasil meraihnya dengan mudah. Dalam hal itulah ketahanan nasional mengambil tempat dan difahami sebagai kekuatan, keuletan, keteguhan dan kebijaksanaan untuk menghadapi pelbagai macam ancaman yang muncul dari dalam dan luar negara (Kemenhan, 2016). Sementara itu, ketahanan nasional juga merupakan perangkat kerja analisis untuk melihat dan memahami serta menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara (Pasaribu, 2013).

Kondisi Indonesia, ketahanan nasional diikat oleh satu basis filosofis yang mengakar, yakni Pancasila. Sejarah mencatat, Pancasila dianggap telah memenuhi standar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, juga merupakan *norma normans*, norma yang mengatur segala norma lain; bukan *norma normata*, sesuatu norma yang diatur oleh norma lain (Pranarka, 1985). Tidak ada satupun dari tiap-tiap sila dalam Pancasila yang disepakati sepihak, melainkan atas dasar musyawarah-mufakat. Kemunculan Pancasila sebagai dasar negara—tempat di mana setiap kebijakan hukum dan tata kelola kenegaraan menggunakannya sebagai pilar—juga lahir dalam centang-perenang kolonialisme, sehingga ia dianggap sebagai representasi semua kalangan (Ludigdo & Kamayanti, 2012).

Sementara itu, Pancasila terelaborasi sedemikian cantiknya dalam butir-butir UUD No. 3 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa: (1) pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; dan (2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Kehadiran Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (basis filosofis) juga bersifat “*beyond*”, atau melampaui satu aspek persoalan negara. Sehingga secara sadar, deskripsi ketahanan nasional mesti didasarkan dari pelbagai disiplin keilmuan (Aziz, 2010). Artinya, setiap kebijakan dan tata kelola kenegaraan yang berhubungan dengan hajat masyarakat Indonesia, itu saling kait-mengait: pangan tidak hanya soal beras, tapi juga soal gizi; politik tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga kemanusiaan. Hal tersebut secara kritis pernah dijabarkan oleh Fransisco Budi Hardiman dalam tulisannya yang bertajuk “*Menggali Pancasila Sebagai Filsafat Politik*” (Hardiman, 2018). Walaupun titik tekan tulisan tersebut lebih mengarah pada masalah-masalah *kebhinnekaan*, setidaknya Pancasila dimaknai sebagai diskursus rasional, sehingga ia dapat digunakan

sebagai artikulasi politik untuk kemudian dapat dipertautkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pikiran-pikiran inilah yang mendasari alur kerja Ketahanan Nasional yang integralistik, komprehensif dan sistematis. Hampir tidak ada masalah-masalah negara yang luput dari pembahasan, seperti sosiologi, politik, ekonomi dan HANKAM pada aspek sosial, sedang dalam aspek alamiah, ketahanan nasional menaruh perhatian pada diskursus ideologi, geografi, kekayaan alam dan kependudukan (Aziz, 2010). Pendeknya, kedua aspek ini terikat satu sama lain, tidak bercerai dan terpotong-potong. Elemen-elemen ini—jika dilihat dengan teropong Pancasila—adalah seperti yang pernah dijelaskan oleh Notonagoro sebagai “inti-isi mutlak”, yaitu “*Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil*” (Notonagoro, 1967).

Secara faktual, ketahanan nasional juga bertindak sebagai doktrin dan instrument metodologis (Kemenhan, 2016). Di titik inilah, Pancasila dapat dilihat sebagai *a thought provoking*. *A thought provoking*, sebagaimana diketahui dalam berbagai tradisi pemikiran adalah sesuatu yang timbul dan bergerak berdasarkan dua fenomena yang berbeda, sehingga memungkinkan seseorang untuk berpikir keras, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi (Dhakidae, 2018). Hubungan pikiran-pikiran ini dengan Ketahanan Nasional tercakup dalam pertanyaan-pertanyaan seputar kebijakan ekonomi, politik, sosial, sumberdaya alam; pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana mengumpulkan masyarakat yang berbeda-beda menjadi satu. Pendeknya, Pancasila mengarahkan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita bersama.

Catatan Integralistik Masalah Pangan

Akan tetapi, jika merujuk pada realitas pembangunan nasional bangsa ini, tentu saja poin-poin penting Ketahanan Nasional belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, bisa dibilang pemerintah kita cukup abai dan terpetak-petak melihat persoalan negara. Di sini, kata “maksimal” tidak secara tegas merujuk pada “kesempurnaan”. Maksimal yang dimaksud dalam kontur pembangunan nasional, sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah upaya untuk mencapai sesuatu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya yang bisa dicapai (KBBI, 2008).

Dalam masalah-masalah pangan, pemerintah Indonesia belum bisa membuat semacam sistem integral untuk memperkuat ketahanan pangan (*food resilience*). Hal tersebut, *pertama*, bisa dilihat dari cara pemangku kebijakan melihat masalah pangan yang hanya dimaknai sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan, tapi mengabaikan persoalan keamanannya. Padahal, sejak tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bersepakat bahwa akses individu keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan, patut diperhatikan (Wang, 2018).

Center for Indonesian Policy Studies, dalam publikasinya yang berjudul “Reformasi Kebijakan Beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia” secara khusus menyinggung masalah keamanan pangan tersebut. Mereka bahkan mengeluarkan rekomendasi untuk menghapus Pasal 9 ayat 1.b pada Permendag Nomor 103/M-DAG/ PER/12/2015 tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang dianggap memberikan cela pada Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam hak untuk memonopoli importasi beras (CIPS, 2017).

Terkait dengan ini, CPIS juga menghimbau pemerintah agar dapat menjamin keamanan pangan dan bertindak sebagai jembatan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses impor tersebut. Kondisi-kondisi impor juga hampir tidak bisa dipastikan oleh Bulog. Akibatnya, Bulog menghabiskan lebih banyak dana untuk impor beras daripada yang seharusnya, sehingga memboroskan anggaran hingga Rp 303 milyar (22,78 juta dolar Amerika Serikat [AS]) antara tahun 2010 hingga 2017 (CPIS, 2017). Itu sebabnya, mengapa masalah pangan sampai dengan saat ini telah berubah menjadi komoditas politik.

Kedua, masalah pangan sebaiknya dilihat lebih holistik tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, melainkan juga pada aspek gizi, keterjangkauan, kualitas dan keterjagaan, serta ketahanan. Memang, dalam survey terakhir Global Food Security Index (GFSI), tantangan Indonesia masih saja sama, yakni minimnya diversitas konsumsi pangan (GFSI, 2018). Jagung, umbi-umbian dan beberapa jenis makanan yang memiliki kandungan sama, tetap saja belum bisa menggantikan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras. Konsumsi beras nasional setiap tahunnya

diperkirakan mencapai 45,7 juta ton (Food and Agriculture Organization [FAO], 2002). Itupun, belum bisa memenuhi 19.4 juta orang yang tidak dapat memenuhi pangannya setiap tahun (Kompas, 2018).

Selain itu, dalam masalah keterjangkauan dan kualitas pangan, Indonesia jelas-jelas benar-benar tertinggal 112 negara-negara dunia, termasuk negara tetangga. Global Food Security Index dengan cemat memberikan data-data tersebut, bahwa: (1) Indonesia berada pada posisi ke 63 dari 113 dalam hal keterjangkauan pangan, jauh di bawah Singapore yang berdiri pada posisi pertama; (2) pada masalah ketersediaan, Indonesia menempati posisi 58; (3) pada masalah kualitas dan keamanan, Indonesia ada pada posisi 84; serta (3) pada soal ketahanan, Indonesia justru jatuh pada posisi 111 dari 113 negara (GFSI, 2018). Secara keseluruhan, GFSI juga mencatat, Singapore adalah negara terbaik dalam urusan pangan.

Alhasil, pemerintah dan elit politik dalam hal ini perlu melakukan riset dan penelitian lebih jauh terkait masalah-masalah pangan, demi menjemput cita-cita dan ketahanan nasional. Asbab, tidak jarang masalah pangan juga dapat melebar pada persoalan sosial yang bikin rusuh. Selanjutnya, konsepsi agraris bangsa ini perlu didorong dan ditransformasikan menuju industrialisasi yang berbasis pertanian. Ini penting untuk diberi perhatian sebab sektor sekunder diyakin sebagai sektor yang dapat mengontrol gerak sektor-sektor lain menuju perekonomian yang lebih modern.

Catatan Masalah Disintegrasi Bangsa

Pada awal tahun 2017, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) resmi mengeluarkan survey tentang wabah hoax nasional. Temuan ini cukup mencengangkan, sebab, paparan data tersebut seolah mengendurkan semangat keberagaman dan kejujuran yang dibangga-banggakan oleh bangsa Indonesia sejak lama. MASTEL, dalam hal ini mencatat bahwa ada 90.3% berita bohong yang disengaja; 61.60% hasutan dan profokasi; 59% berita tidak akurat; 14% ramalan/fiksi ilmiah; dan ada 12.60% berita yang menyudutkan pemerintah (MASTEL, 2017). Tentu saja gambaran ini berpengaruh, sekaligus masuk dalam cakupan pembahasan Ketahanan Nasional. Kesadaran tentang berbangsa dan bernegara tanpa memandang latar belakang

keagamaan, ras, suku dan adat istiadat—dalam prinsip Ketahanan Nasional—adalah pilar penting untuk menjaga keutuhan bangsa (Kemenhan, 2016).

Selain itu, dua lembaga survey, masing-masing Lingkaran Survey Indonesia (2018b) dan Saiful Mujani Research and Consulting/SMRC (2017) pernah membuat survey mengenai topik terkait Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan yang paling mengagetkan, kedua survey ini menunjukkan hal yang sama: bahwa dalam kurun waktu 13 tahun (2005-2018) ada penurunan sekitar 10% dari masyarakat terhadap Pancasila, dan berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya menjadi negara Khilafah Islamiyah (Denny JA, 2018).

Kedua persoalan ini, semakin diperparah—boleh bilang juga didukung—dengan merebaknya isu-isu intoleransi, kekerasan atas nama agama yang berakhir pada aksi-aksi terorisme. Hal-hal ini, sebagaimana Yudie Haryono (2018), seperti ada serangkaian cara yang digalakkan secara sistematis dan dikontrol untuk merobek nuansa kemajemukan. Yang lebih mengejutkan lagi, jika dulu peristiwa ini hanya dilakukan secara sistematis dan rahasia, kali ini justru dilakukan secara terbuka, bahkan dimotori oleh satu keluarga³. Hal ini terbukti Pada tanggal 13 Mei 2018, publik Indonesia dikejutkan oleh serang bom di sejumlah gereja yang berada di Surabaya.

Gelombang aktifitas keagamaan yang bercorak radikal, berikut minimnya literasi dan pemahaman media sosial dianggap telah menjadi persoalan baru yang berkait-kelindan. Memang, peristiwa ini juga tidak lari dari kemelut Arab Spring, sebagai sebuah gerakan konservatif gaya baru di abad 21 (Muhtadi, 2009). Anak-anak muda, generasi millennial tumbuh dalam lingkungan religius yang, meminjam Kuntowijoyo (2017), dalam “Identitas Politik Umat Islam”, memperoleh informasi mengenai agama mereka tidak lagi dari Kyai dan Pesantren, melainkan kaset, video-video dan rekaman digital. Sehingga, ada kecenderungan pemahaman keagamaan cukup keras, yang pada akhirnya merusak tatanan Kebhinnekaan yang kita jaga selama ini.

³ Di antara para pelaku bom bunuh diri yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 di Surabaya tersebut adalah Dita Upriyanto (48), istrinya Puji Kuswati (43) dan mengajak empat anaknya bernama Yusuf Fadil (18), Firman Halim (16), Fadilah Sari (12), dan Pamela Rizkita (9). Mereka melakukan bom bunuh diri di tiga titik: (1) Gereja Santa Maria Tak Bercela, (2) GKI Diponegoro, (3) GKKI Arjuno, berita selengkapnya dikutip penulis melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>

Apalagi, saat ini masyarakat Indonesia sedang berada dalam tahun politik, yang memungkinkan resiko centang-perenang dalam tubuh bangsa ini semakin besar. Hal itu bahkan ditandai terbelahnya istilah untuk kedua kubu dalam pilpres 2019 nanti. Simpatisan Prabowo disebut sebagai “Kampret”, sedang Jokowi disebut “Cebong”. Peristiwa semacam ini, tentu saja merupakan bagian alamiah dari semiotika. Orang-orang memang sengaja membuat tanda-tanda penunjukkan, metafora dan simbolisme untuk mengungkapkan makna (Sanders, 2004). Akan tetapi, dalam situasi dan kondisi Indonesia saat ini, simbol-simbol tersebut lebih mengarah pada atribut-atribut keagamaan. Bahkan, praktik-praktik semacam ini secara implisit sedapat mungkin dapat menjadi alat untuk membatasi siapa yang benar—yang mengikuti simbol—dan siapa yang salah.

Hal semacam ini, tentu saja—cepat-lambat—dapat mengikis falsafah berbangsa dan bernegara Indonesia. Di titik inilah Ketahanan Nasional mengambil peran signifikan, Peristiwa-peristiwa ini juga masuk dalam cakupan Ketahanan Nasional “*mawas dalam*”, yakni sebuah aktifitas untuk menjaga stabilitas bangsa dari ancaman-ancaman dari dalam bangsa itu sendiri (Kemenhan, 2016). Sehingga, perhatian bangsa patut untuk diletakkan guna menyelesaikan serampangan aktivisme ini.

Tentu saja, persoalan ini hanya akan bisa diselesaikan dengan mengangkat kembali nilai-nilai Pancasila ke publik masyarakat Indonesia. Ini bisa dilakukan, *pertama*, dengan mengajarkan bahwa Pancasila, adalah basis fundamental negara yang berupa “*weltenschaung*”—sebuah “Pandangan Dunia” yang tidak terikat oleh kultur, pengalaman-pengalaman keagamaan, atau suku dan ras tertentu. Pendeknya, Pancasila bukan sebuah traktat atau dokumen yang membawa pada keselamatan akhirat, yang berbeda pada tiap-tiap ajaran agama. Melainkan, meminjam F. Budi Hardiman, Pancasila adalah sebuah wawasan dunia “kultur”. Gagasan ini merupakan keleluasaan untuk menjadi siapa saja; entah itu orang Jawa, Batak, Gorontalo, Makassar—asalkan tidak melepaskan prinsip persaudaraan seindonesia.

Kedua, Pancasila memang benar-benar harus dimaknai sebagai konsep atau sebuah rekayasa politis yang mampu menggantikan—atau juga mewakili—semangat masyarakat Indonesia. Artikulasi dunia kehidupan, dalam hal ini dijelaskan oleh

Hardiman (2018), merupakan sebuah rumusan atau refleksi atas hal-hal yang “*taken for granted*”, atau sudah ada sejak lama. Jika ditarik dalam diskursus kebudayaan Indonesia, pengertian ini secara jelas tidak menjadikan Pancasila sebagai pengganti budaya. Ia justru akan menjadi seperti jembatan yang hendak menyampaikan entitas kebudayaan yang pada dasarnya berbeda menjadi satu dalam pesan-pesan keadilan, harkat-martabat dan kemanusiaan.

Di titik inilah sebenarnya, elit pemerintah harus berperan aktif. Realisasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh lagi sekadar timbul dalam seminar yang diadakan di hotel-hotel mewah. Ia, nilai Pancasila, harus bisa ditumbuh-kembangkan di dalam lingkup komunitas dan organisasi kepemudaan dengan cara yang dialogis (Gerung, 2018). Menanamkan sesanti Pancasila dengan “tafsir ini-itu” hanya akan membuat Pancasila menjadi subjektif. Akan tetapi, jika ia didasari semangat untuk menguatkan persaudaraan dalam *Bhinneka Tunggal Ika*, maka Pancasila akan dilihat sebagai universalitas, mewakili pusparagam pemikiran, tindakan, kebudayaan dan apapun di dalam kontur sosial-politik masyarakat Indonesia.

Penutup

Mencermati pasang-surut Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia, setidaknya dapat dimaknai dua hal. **Pertama**, ia tidak ubahnya meraba-raba masa depan bangsa, **kedua**, ia juga berhubungan erat dengan masa lalu. Itu sebabnya, Ketahanan Nasional bangsa Indonesia, diikat oleh satu basis fundamental: Pancasila. Pancasila, sebagaimana kita tahu lahir dari proses panjang. Tiap-tiap sila didasari kesepakatan, bukan keputusan sepihak. Berangkat dari basis inilah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah mengambil tempat, mengekstraksi tiap-tiap sila menjadi landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru yang mencekam berakhir, tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks. Globalisasi memberikan semacam ekosistem baru terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, politik dan sosial. Itu sebabnya, kemelut dan ancaman yang terjadi bukan hanya dari luar, melainkan juga bisa dikonstruksikan

dari dalam. Mulai dari masalah pangan, ekosistem politik, sumber daya, teknologi menghadapi kait-kelindan. Apalagi, masyarakat Indonesia, saat ini sedang berada di tahun-tahun politik. Alih-alih menyatakan bahwa, semangat Pancasila bangsa ini telah terabaikan.

Berangkat dari hal-hal inilah kemudian, prinsip Ketahanan Nasional perlu diteguhkan lagi. Ketahanan Nasional, sebagaimana diketahui adalah keuletan, keteguhan dan kekuatan untuk mengatasi ancaman apapun yang berkaitan dari dalam maupun luar negara. Prinsip-prinsip ini juga, diikatkan pada sebuah basis fundamental bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sehingga, alur kerja Ketahanan Nasional bangsa Indonesia, harus terjalin secara integralistik dan menyeluruh.

Dalam menyikapi masalah pangan, elit pemerintahan tidak boleh hanya sekadar melihat ketimpangan pangan dalam konteks ketersediaan bahan makanan, melainkan juga pada kualitas, keamanan, keterjangkauan dan ketahanan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pangan tidak menjadi komoditas politik, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini, dalam prinsip Ketahanan Nasional merupakan cara pikir yang integratif.

Selain itu, penting untuk memperhatikan situasi dan kondisi politik bangsa Indonesia. Sebab, akhir-akhir ini kasus dan isu SARA sedang mengemuka. Hal tersebut dikarenakan adanya dua hal. *Pertama*, peluberan informasi, *kedua*, lahirnya sikap keras dalam beragama. Kedua variabel ini, membentuk semacam kekuatan untuk mengendurkan semangat kemajemukan bangsa. Untuk itu, upaya-upaya mengangkat nilai-nilai Pancasila harus digalakkan kembali. Lewat dialog dan diskusi tukar pikiran, Pancasila dapat diangkat menjadi sebuah *pandangan dunia & artikulasi politik*. Keduanya, sungguh dapat memberikan kita pemahaman yang universal terhadap Pancasila. Sehingga, dalam keadaan apapun masyarakat Indonesia tetap bisa merealisasikan cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. R. A. (2010). Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara. Seminar on National Resilience.

- Center for Indonesia Policy Studies. (2017). Reformasi Kebijakan Beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia. Organization. https://docs.wixstatic.com/ugd/c95e5d_cc33bc7c078249fbbd51e466ba11fe45.pdf
- Dhakidae, Daniel. 2018. Lima Bulan Yang Mengguncang Dunia: Kelahiran Pancasila, Proklamasi, dan Pendirian Negara-Bangsa. *Jurnal Prisma* 2 (1). 4-31.
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2002). World agriculture: towards 2015 / 2030 World agriculture: towards 2015 / 2030. Organization. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(03\)00047-4](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(03)00047-4)
- Gerung. Rocky. (2018), Pancasila: Ide Penuntun, Bukan Pengatur. *Jurnal Prisma* 2 (3). 40-48
- Global Food Security Index. (2018). Kondisi Pangan Indonesia. Organization. <https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Indonesia>
- Hardiman, F. B. (2004). Demokrasi deliberatif: model untuk Indonesia pasca-Soeharto. *Majalah Basis* Nomor.
- Hardiman. F. Budi. 2018. Menggali Pancasila Sebagai Filsafat Politik. *Jurnal Prisma* 2 (2). 32-48.
- Haryanto. (2017). Konfigurasi Elit dan Demokrasi: Aktor, Sumber Daya, dan Strategi Kontestasi. *Jurnal Prisma*, 36, 22-37.
- Haryono, M. Yudhie. (2005). *Melawan Dengan Teks*. Yogyakarta: Resist Book.
- KBBI, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. <https://doi.org/10.1021/ic048329z>
- Kemenhan. (2016). *Bela Negara Dan Kebijakan Pertahanan*. Majalah WIRA.
- Kompas. (2018). 19 Juta Orang Tidak Dapat Memenuhi Pangan. [online accessed]. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memuhi-kebutuhan-pangan>
- Kuntowijoyo, K. (1994). Between Mosque and Market: the Muslim Community in Quiapo, Metro Manila. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.15408/sdi.v1i3.849>
- Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World Journal of Social Sciences*.
- Muhtadi, B. (2009). The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>
- Pasaribu, R. B. F. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Ejournal Gunadarma.
- Rix, M. (2003). Globalization: A Critical Introduction. *Personnel Review*. <https://doi.org/10.1108/pr.2003.32.2.252.1>
- Sanders, C. (2004). Introduction: Saussure today. *The Cambridge Companion to Saussure*. <https://doi.org/10.1017/CCOL052180051X.001>
- Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. Blueprint.
- Undang-Undang Dasar 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia § (1945)*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Wang, Z. (2018). Economic Competition, Policy Interdependence, and Labour Rights. *New Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/13563467.2018.1384452>.

BIODATA PENULIS

Tarmizi Abbas, lahir di Gorontalo pada tanggal 28 Mei 1996, menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo pada program studi Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2017. Menjadi kader HmI mulai dari 2013 sampai 2017. Tarmizi juga menyelesaikan jenjang perkaderan HmI hingga pada tahap Intermediate Training pada tahun 2016 di HmI Cabang Gorontalo. Tarmizi menyukai bidang studi filsafat dan pemikiran Islam. Di sela waktu, laki-laki ini suka sekali berpuisi menulis bebas dan bernyanyi, karena sering dihantam rindu dan patah hati. Saat ini, beliau sedang berusaha mengejar cita-cita untuk lanjut studi pada bidang Ushuluddin; Filsafat dan Pemikiran Islam di Luar Negeri, Dapat dihubungi di abbastarmizi@gmail.com.

Ismail Suardi Wekke, staf di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong sejak 2010. Menyelesaikan pendidikan doktoral di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan dukungan Ford Foundation International Fellowship Program. Pertama kali mengenal Himpunan Mahasiswa Islam di dengan Latihan Kader I di Komisariat Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Menyelesaikan Intermediate Training di Koordinator Komisariat Universitas Hasanuddin (1996). Terakhir, menyelesaikan Advance Training di Badan Koordinasi HmI Kalimantan Barat (2005). Jenjang pengabdian sebagai kader dicapai dengan amanah terakhir sebagai Wakil Sekretaris Jenderal bidang Hubungan Internasional Pengurus Besar HmI 2006-2008. Sebelum itu, Departemen Hubungan Internasional Pengurus Besar HmI 2003-2005. Wakil Bendahara Umum Cabang Ujung Pandang, Bendahara Umum Koordinator Komisarita IAIN Alauddin Ujung Pandang, Sekretaris Umum Komisariat Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang. Email yang dapat dihubungi: iswekke@gmail.com.